

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori penelitian. Landasan teori penelitian ini adalah Teori legitimasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian mulai dari awal hingga penelitian dapat diambil kesimpulan dan sarannya.

2.1 Landasan Teori

Lindblom (1994) dalam Deegan (2002), mendefinisikan legitimatic theory sebagai berikut:

“... sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagaimananya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

(Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009) Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan system norma, nilai kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

Inti dari teori legitimasi adalah pembenaran tindakan atau aktivitas berdasarkan peraturan pemerintah. Keberadaan SAK EMKM adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan peraturan menurut aturan regulator terkait tatacara penyajian laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Mnengah (UMKM).

Semua aktivitas yang muaranya bertujuan memperoleh kesepakatan atas tata cara atau kegiatan atau tindakan yang diregulasi maka cocok menggunakan legitimasi. Keberadaan SAK EMKM juga sekali lagi memperkuat legitimasi laporan keuangan UMKM karena dibuat dengan standar yang seragam. Pun demikian dengan CSR, CSR diatur pemerintah dan UU PT 5% laba harus didistribusikan untuk kegiatan CSR.

Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat dalam mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Keberlangsungan UMKM sangat dipengaruhi dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang benar adalah sesuai dengan SAK EMKM. Transisi pencatatan laporan keuangan dari 5 buku ke SAK EMKM diperlukan sosialisasi dan bimbingan bagi UMKM oleh pihak Dinas Perdagangan dibantu dengan IAI serta Institusi Perguruan Tinggi STIE Perbanas Surabaya agar tercapai laporan keuangan UMKM berstandar.

2.2 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Secara umum ciri ciri UMKM adalah :

Manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah Kebersamaan, Ekonomi Yang Demokratis, Kemandirian, Keseimbangan Kemajuan, Berkelanjutan, Efisiensi Keadilan, Serta Kesatuan Ekonomi Nasional.

A. KRETERIA UMKM

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Atau Usaha Menengah, oleh Pemerintah diberikan batasan berdasarkan Undang-Undang No 20 Th 2008 sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas Peredaran Usaha dan atau Jumlah Aktiva yang dimiliki sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah :

Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2. Kriteria Usaha Kecil adalah :

Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Kriteria Usaha Menengah adalah :

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

NO	KETERANGAN	ASET BERSIH	PENJUALAN
1.	USAHA MIKRO	Rp 0-Rp50.000.000	Rp 0 – Rp300.000.000
2.	USAHA KECIL	Rp 50.000.000 – Rp500.000.000	Rp 300.000.000 – Rp2.500.000.000
3.	USAHA MENENGAH	Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000	Rp 2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang No 20 tahun 2008

B. BIDANG UMKM

Data dari Dinas Perdagangan Surabaya menunjukkan bahwa bidang UMKM tidak hanya makanan dan minuman saja tetapi beraneka ragam bidang, antara lain:

1. UMKM Bidang Kuliner - Jualan Cemilan, Gorengan, Jualan Makanan, Membuka Rumah Makan, Membuka Restoran Kecil Atau Bisa Juga Membuka Usaha Kafe.
2. UMKM Bidang Fashion - Toko Pakaian Skala Kecil, Distro Yang Menjual Pakaian Khusus Untuk Anak Muda, Toko Batik, Baju Muslim Dan lain sebagainya.
3. UMKM Bidang Handycraft – Berbagai Kerajinan Tangan yang saat ini sedang Digalakkan Di Surabaya bagi Para UMKM seperti, Tudung Saji, Bros, Cincin, Kalung, dan lain sebagainya.
4. UMKM Bidang Pertanian - Bisnis UMKM dalam bidang pertanian ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan, negara kita ini memiliki tanah yang cukup subur, 70% mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia ialah Petani. UMKM bidang pertanian cukup banyak seperti Usaha Pertanian Padi, Jagung, Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias dan lain sebagainya.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif tersebut.

SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam bab 1 sampai bab 18. Yang dimulai dari ruang lingkup sampai tanggal efektif SAK EMKM. SAK EMKM dilengkapi dengan ilustrasi laporan keuangan. Entitas dapat menggunakan ilustrasi sebagai panduan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan entitas terdiri dari : (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, (c) catatan atas laporan keuangan.

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS	
ENTITAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
DAFTAR ISI	
LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	1
LAPORAN LABA RUGI.....	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

Format Daftar Isi Laporan Keuangan Entitas

a. Laporan Posisi Keuangan

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa

masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya

1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset. Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa: (a) Kas; (b) Instrumen ekuitas entitas lain; dan (c) Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain.

2. Liabilitas

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- (a) Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

- (b) Akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Contoh aset dan liabilitas keuangan yang dicakup dalam ruang lingkup aset dan liabilitas termasuk:

- (a) Piutang dan utang;
- (b) Pinjaman yang diberikan atau yang diterima;
- (c) Investasi pada instrumen utang (contoh: obligasi yang diperdagangkan); dan
- (d) Investasi pada instrumen ekuitas (contoh: saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek).

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya.

Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi (*transaction price*). Contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk pinjaman, harga transaksinya adalah sebesar jumlah pinjaman.

- (b) Untuk piutang atau utang, harga transaksinya adalah sebesar jumlah tagihan.
- (c) Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang, harga transaksinya adalah sebesar imbalan yang diberikan (contoh: kas yang dibayarkan untuk memperoleh investasi dalam bentuk saham perusahaan publik). Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai pada aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2018		
ASET	2018	2017
KAS DAN SETARA KAS		
KAS		
GIRO		
DEPOSITO		
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS		
PIUTANG USAHA		
PERSEDIAAN		
BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
ASET TETAP		
AKUMULASI PENYUSUTAN		
JUMLAH ASET		
LIABILITAS		
UTANG USAHA		
UTANG BANK		
JUMLAH LIABILITAS		

EKUITAS		
MODAL		
SALDO LABA		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		

Gamabr 2.2
Format Laporan Posisi Keuangan sesuai SAK EMKM

b. Laporan Laba Rugi

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

(a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas

entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya:

penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

(b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan

namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan

dari pelepasan aset.

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

(a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal

meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

(b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun

tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan

aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018		
	2018	2017
PENDAPATAN		
PENDAPATAN USAHA		
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
JUMLAH PENDAPATAN		
BEBAN		
BEBAN USAHA		
BEBAN LAIN-LAIN		
JUMLAH BEBAN		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		

Gambar 2.3
Format Laporan Laba Rugi sesuai SAK EMKM

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan penyajiannya adalah Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM;
- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi;

(c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017	
1. UMUM	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. Xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdominasi di Jalan xxx, Jakarta Utara
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Pernyataan kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.
b. Dasar penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.
c. Piutang usaha	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya rata-rata.
e. Aset tetap	

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak penghasilan
Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia

3. KAS		
Kas kecil _Rupiah	2018 XXX	2017 XXX
4. GIRO		
PT Bank XXX-Rupiah	2018 XXX	2017 XXX
5. DEPOSITO		
PT Bank XXX – Rupiah	2018 XXX	2017 XXX
Suku bunga deposito: Rupiah	XXX	XXX
6. PIUTANG USAHA		
Toko A	2018 XXX	2017 XXX
Tobo B	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
Sewa	2018 XXX	2017 XXX
Asuransi	XXX	XXX
Lisensi dan perizinan	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
8. UTANG BANK		
Pada tanggal 4 maret 2018, entitas memperoleh pinjaman kredit modal kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit RpXXX, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 2018. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		

9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	2018	2017
Penjualan	XXX	XXX
Retur Penjualan	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	2018	2017
Bunga pinjaman	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	2018	2017
Pajak penghasilan	XXX	XXX

Gambar 2.4
Format Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut UU No 20 tahun 2008, entitas kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah. Bentuk hukum UMKM di Indonesia bervariasi seperti perusahaan perorangan, persekutuan (CV, Firma), koperasi, dan perseroan terbatas. Namun, contoh ilustrasi yang ada pada SAK EMKM bukan ilustrasi bentuk laporan keuangan bentuk hukum entitas. Penyusunan laporan keuangan usaha menggunakan dasar akrual. Apabila entitas

sebelumnya menggunakan basis kas maka harus melakukan penyesuaian menjadi dasar akrual. Dasar akrual mencatat transaksi pendapatan atau beban pada saat terjadinya. Dasar akrual menghasilkan laporan keuangan yang mengaitkan pendapatan dengan biaya yang terjadi dalam periode yang sama.

Tujuan SAK EMKM antara lain adalah :

1. Amanah UU no 1/ 2013

(Pasal 29 Ayat 1 UU no 1 2013) tentang Lembaga Keuangan Mikro mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku,

1. LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:
3. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
4. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
5. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Memfasilitasi UMKM dalam transisi pelaporan berdasarkan kas ke berdasar akrual.

Dasar Akrual (SAK EMKM 2016). Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset,

liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

Membantu UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya dimasa depan. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan guna membantu UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran usahanya dimasa depan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI, DAN KESALAHAN

SAK EMKM mengatur kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Serta mengatur perlakuan akuntansi jika terdapat perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika ED SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam ED SAK EMKM.

ED SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu

pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif ED SAK EMKM. Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam ED SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut:

- (a) Disyaratkan berubah sesuai dengan ED SAK EMKM; atau
- (b) Akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan.

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. Hal tersebut dikecualikan apabila Entitas mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada: (a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut; atau (b) periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya.

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal: (a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan (b) yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis,

kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara: (a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi; atau (b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali. Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan). Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan.

2.4 Kerangka Pemikiran

